

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PARTISIPASI PEREMPUAN CALON ANGGOTA  
LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KOTA SUNGAI PENUH**

***FACTORS CAUSING THE PARTICIPATION OF FEMALE CANDIDATES FOR  
LEGISLATIVE MEMBERS IN THE 2019 GENERAL ELECTION IN THE CITY OF  
SUNGAI PENUH***

**Hafiz Al-Ma'Arij<sup>1)\*</sup>, Tamrin<sup>2)</sup>, Indah Adi Putri<sup>3)</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Andalas

[Arijhafiz@gmail.com](mailto:Arijhafiz@gmail.com)

**ABSTRAK:** Partisipasi perempuan dalam bidang politik, telah menjadi fokus perhatian yang meningkat dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan representasi yang lebih baik. Adanya Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD yang menjelaskan terkait *affirmative action* atau kebijakan afirmasi memberikan peluang kepada perempuan untuk dapat bersaing dengan kaum laki-laki. Pada penelitian ini, peneliti berusaha membahas terkait faktor-faktor penyebab partisipasi perempuan dalam politik. Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori partisipasi politik perempuan oleh Mona Lena Krook yang menjelaskan tentang adanya motivasi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus wawancara, dengan mengambil Kota Sungai Penuh sebagai lokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan caleg perempuan pada pemilu legislatif 2019 Kota Sungai Penuh lalu, peneliti memberikan gambaran kesimpulan bahwasanya, perempuan ingin berpartisipasi dalam panggung politik adalah ingin merubah nasib suatu kaum maupun diri sendiri. Faktor lain juga menunjukkan bahwasanya adanya keterikatan antara pengurus partai politik dengan perempuan memberikan peluang agar dapat menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kota Sungai Penuh.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Perempuan, Calon Anggota Legislatif, Pemilihan Umum*

**ABSTRACT:** *Women's participation in politics has become an increasing focus in the efforts to achieve gender equality and better representation. The existence of Law No. 7 of 2017 concerning the General Elections for Members of the DPR, DPRD, and DPRD, which explains affirmative action policies, provides opportunities for women to compete with men. In this research, the researcher attempts to discuss factors causing women's participation in politics. The theory used by the researcher is the theory of women's political participation by Mona Lena Krook, which explains the motivation of an individual to engage in politics. The research method employed in this study is qualitative, using a case study approach through interviews, with Kota Sungai Penuh as the research location. Interviews conducted by the researcher with female candidates in the 2019 legislative elections in Kota Sungai Penuh provide the conclusion that women's desire to participate in the political arena is driven by the desire to change the fate of a community or themselves. Another factor shows that the affiliation between political party officials and women provides an opportunity for them to become candidates for legislative members in the 2019 elections in Kota Sungai Penuh.*

**Keywords:** *Women's Participation, Legislative Candidates, General Elections*

## **A. PENDAHULUAN**

Kurangnya peran perempuan dalam sebuah lembaga pengambil keputusan di Indonesia menjadi permasalahan utama, apalagi disaat transisi menuju negara yang demokratis dengan mensyaratkan kesetaraan dan hak bagi perempuan. Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, maka problem soal besar kecilnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat ditentukan dan tergantung dari parpol. Hal tersebut memberikan gambaran bahwasanya parpol

mempunyai posisi penting dalam rangka rekrutmen dan kandidasi terhadap politisi perempuan. Dalam konteks ini, parpol selalu dianalogikan sebagai *gatekeeper*, yaitu institusi politik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan seleksi dan kandidasi terhadap politisi perempuan.

Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pencalonan semestinya memberikan hak, kesempatan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan dicalonkan oleh partai politik. Akan tetapi, realitas dunia politik sering mengabaikan masalah, kebutuhan dan aspirasi kaum perempuan karena dianggap hal itu sebagai wilayah privat, bukan sebagai ranah formal. Misalnya, masalah pelabelan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang hanya berkutat pada wilayah domestik menjadi salah satu penyebab perempuan sulit masuk ke wilayah politik.

Kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan menjadi point penting dalam tatanan kehidupan saat ini, konsep inilah yang menjadi upaya dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan di ranah publik dan politik. Kehadiran kaum perempuan di tengah publik dan menjadi suatu tokoh maupun sebagai perwakilan dan pemimpin menjadi faktor krusial dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi kaum perempuan. Konstruksi dari sistem budaya dan sosial yang selama ini mengkerdikan keterlibatan perempuan yang mengakibatkan keterwakilan perempuan dan persepsi terhadap perempuan tersebut menjadi terabaikan.

Sebenarnya telah banyak studi penelitian yang menjelaskan terkait dengan partisipasi perempuan, seperti dalam tulisan Fredik Lambertus Kollo tentang budaya patriarki dan partisipasi perempuan dalam politik yang menjelaskan gambaran umum terkait dengan faktor-faktor rendahnya perempuan ikut dalam politik dengan adanya sebuah pengaruh budaya patriarki. Konsep tersebut berhubungan dengan yang terjadi di Kecamatan Siau Barat Selatan bahwa pemilih hanya memilih perempuan dalam pemilu legislatif berdasarkan informasi diterima baik berupa lingkungan maupun hubungan masyarakat.

Menurut Michael Rush, Philip dan Althoof, berpandangan bahwasanya partisipasi politik dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan masyarakat disebuah negara untuk mempengaruhi perumusan maupun proses kebijakan publik serta memiliki hak dalam memilih maupun dipilih dalam sebuah pemerintahan. Segala hal yang membahas tentang kebijakan publik maupun terkait pemerintahan dapat diartikan sebagai pengetahuan politik

Sebelum memasuki keterpilihan masyarakat latar belakang pencalonan merupakan sesuatu yang sangat harus dikaji hal tersebut lah yang mendorong peneliti untuk membahas terkait dengan alasan perempuan mau mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilihan umum legislatif. Kota Sungai Penuh merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jambi, merupakan sebuah kota kecil tetapi memiliki beberapa fenomena yang menarik untuk diteliti.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional dijelaskan bahwasanya pemilihan umum pada tahun 2009, 2014 serta 2019 keterwakilan perempuan yang terpilih ataupun yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Sungai Penuh sangat rendah atau menurun dari periode sebelumnya sampai periode sekarang. Dijelaskan bahwasanya perempuan yang mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif dari tahun 2009 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang duduk sebagai anggota DPRD di Kota Sungai Penuh. Meskipun dalam segi pencalonan telah mencukupi tetapi dalam keterpilihan caleg perempuan yang ada di Kota Sungai Penuh cukup terbilang sangat rendah.

Kebijakan *affirmative action* telah dilaksanakan oleh partai politik tetapi tidak terealisasikan dengan baik. Alasan perempuan mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu hanya pemenuhan kuota menjadi salah satu asumsi dari peneliti, rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik memiliki aspek terutama pada pemenuhan kuota oleh partai politik agar partai tersebut dapat lolos mengikuti pemilihan umum, tidak hanya tersebut pengkaderan dari partai politik cenderung dikatakan kurang terhadap perempuan sehingga masyarakat tidak yakin akan memilih perempuan agar dapat duduk di lembaga legislatif.

Berdasarkan apa yang telah di latar belakang dijelaskan diatas membuat peneliti ingin mencari lebih jauh terkait dengan penelitian tentang partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif yang ada di Kota Sungai Penuh. Peneliti memfokuskan penelitian ini terkait alasan mengapa perempuan mau mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif dalam sebuah pileg 2019 di Kota Sungai Penuh. Jadi disini peneliti mencari tahu tentang alasan perempuan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum 2019 yang ada di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan

asumsi peneliti, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu apa faktor-faktor yang mendasari perempuan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019 di Kota Sungai Penuh?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif dan wawancara. Metode penelitian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keterangan maupun gambaran yang lebih akurat. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berdasarkan data turun lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji yaitu, partisipasi perempuan dalam politik pada pemilu legislatif di Kota Sungai Penuh tahun 2019. Pada penelitian ini tidak hanya mencari data berdasarkan hasil wawancara melainkan juga melihat data dari Komisi Pemilihan Umum yang berada di daerah penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum disuatu daerah menimbulkan banyak fenomena diantara salah satunya terkait dengan pencalonan anggota legislatif sebagai bentuk partisipasi dalam politik. Partisipasi dalam politik sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan baik itu dari segi memilih, mencalonkan diri, ikut kampanye maupun mensosialisasikan tentang pemilihan umum. Pemilihan umum juga tidak terlepas dengan kehadirannya sebuah partai politik, partai politik merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan, oleh sebab itu banyak partai politik berbondong-bondong mencari kadernya untuk mencalonkan kadernya menjadi anggota legislatif, tidak terkecuali dengan anggota partai yang berjenis kelamin perempuan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang *affirmative action* sebagai upaya mewajibkan partai politik memiliki 30% anggota perempuan-nya untuk menjadi calon anggota legislatif. Hal tersebut telah diatur dalam UU No.8 tahun 2012 tentang kewajiban partai politik memiliki 30% calon anggota legislatif perempuan di setiap tingkatan baik tingkatan pusat maupun kota/kabupaten, tidak hanya hal tersebut kepengurusan partai-pun harus diisi seminimal mungkin 30% kader perempuan. Peran perempuan diharapkan menjadi penyeimbang dalam sebuah lembaga terkait dengan adanya sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan tersebut menjadi harapan bagi seluruh masyarakat agar menjadi peran pemerataan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Partai di Kota Sungai Penuh juga berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan memberikan peluang kepada perempuan agar dapat berkontribusi aktif dalam memperjuangkan haknya. Pada pemilihan 2019 yang ada di Kota Sungai Penuh, salah satu partai yang telah menjalankan kewajibannya terkait dengan kebijakan *affirmative action* yaitu Partai Gerindra yang telah mencalonkan 9 caleg perempuan pada pemilu 2019 atau hitungan sekitar 34,48%. Dapat dipastikan bahwasanya kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah, Partai Gerindra telah melakukan kewajibannya terhadap kebijakan yang mewajibkan minimal 30 persen perempuan berpartisipasi dalam politik.

Pemilihan umum 2019 yang ada Kota Sungai Penuh lalu, partai PKS memiliki 8 caleg perempuan atau 36,3% dari caleg partai. Namun tidak ada caleg dari partai PKS yang terpilih menjadi anggota DPRD. Ruang gerak perempuan yang ada di Indonesia saat ini dapat dibilang cukup minim karena budaya yang berkembang dimasyarakat hanya menilai bahwasanya sosok laki-laki lah yang tepat menjadi seorang pemimpin,

Sejatinya di Kota Sungai Penuh telah mencapai kuota wajib 30% disetiap partainya, tetapi kursi DPR yang ada di Kota Sungai Penuh tidak menunjukkan hasil dari upaya partai melengkapi kuota tersebut. Peneliti melihat ada satu fenomena dimana seseorang mau bergabung dalam satu partai adalah untuk mendaftarkan dirinya sebagai anggota legislatif di Kota Sungai Penuh. Latar belakang dari perempuan tersebut bersedia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas.

Latar belakang pendidikan merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pencalonan seorang perempuan ke dalam posisi publik atau jabatan tertentu. Pendidikan dapat

memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang mendasari serta relevan dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban oleh calon tersebut.

**Tabel 4. 5**  
**Peta Pendidikan Caleg Perempuan Kota Sungai Penuh**

NAMA	PARTAI	PENDIDIKAN
Mory Amdiya Dewi	Partai Gerindra	Sarjana/Strata 1 (S1)
Poppy Lolita	Partai Gerindra	Sarjana/Strata 1 (S1)
Weni Arice	Partai Gerindra	Sarjana/Strata 1 (S1)
Fenti Desi Arzeta	Partai PKS	Sarjana/Strata 1 (S1)
Yopi Reri Putriani	Partai PKS	SMA/Sederajat
Nurasiah	Partai Demokrat	SMA/Sederajat
Murti	Partai Demokrat	SMP/Sederajat
Dewi Sartika	Partai PDI Perjuangan	SMA/Sederajat
Nurhadia	Partai PDI Perjuangan	SMA/Sederajat
Suci Anggraini	Partai PKB	Sarjana/Strata 1 (S1)
Dewi Mini Susanti	Partai PDI Perjuangan	Sarjana/Strata 1 (S1)
Lisminar	Partai PDI Perjuangan	SMP/Sederajat

*Sumber : diolah peneliti dari data wawancara informan*

Seperti halnya dengan pendidikan, daftar pekerjaan seorang caleg perempuan pun menjadi point penting dalam mencari faktor-faktor penyebab partisipasi perempuan dalam politik. Berikut data terkait dengan daftar pekerjaan calon anggota legislatif perempuan.

**Tabel 4. 6**  
**Peta Pekerjaan Caleg Perempuan Kota Sungai Penuh**

NAMA	PARTAI	PEKERJAAN
Mory Amdiya Dewi	Partai Gerindra	Kader Partai Gerindra
Poppy Lolita	Partai Gerindra	Kader Partai Gerindra
Weni Arice	Partai Gerindra	Wirausaha
Fenti Desi Arzeta	Partai PKS	Guru Sekolah Alam
Yopi Reri Putriani	Partai PKS	Kader Partai PKS
Nurasiah	Partai Demokrat	Ibu Rumah Tangga
Murti	Partai Demokrat	Wirausaha
Dewi Sartika	Partai PDI Perjuangan	Guru Sekolah Menengah
Nurhadia	Partai PDI Perjuangan	Guru Sekolah Dasar
Suci Anggraini	Partai PKB	Ibu Rumah Tangga
Dewi Mini Susanti	Partai PDI Perjuangan	Wiraswasta
Lisminar	Partai PDI Perjuangan	Pengusaha

*Sumber : diolah peneliti dari data wawancara informan*

Salah satu caleg yang berasal dari partai Demokrat Nurasih menyebutkan bahwasanya dirinya mendaftarkan diri untuk mengubah nasib diri sendiri, dan ia berpikiran bahwasanya apapun pendidikan ataupun pekerjaan yang dimiliki seorang caleg dengan kemampuan -nya diharapkan dapat memberikan sebuah perubahan.

Terdapat pandangan bahwa perempuan seringkali hanya diikutsertakan untuk memenuhi kuota gender, dan ini seringkali tidak mencerminkan ambisi atau kualifikasi mereka dalam dunia politik. Dalam konteks ini, "mak-mak berdaster" merujuk kepada perempuan yang berusaha mencapai posisi politik, namun mungkin terbatas dalam hal pendidikan atau pengalaman politik. Kendati demikian, ada harapan bahwa dengan meningkatnya pendidikan dan pelatihan politik, perempuan dapat merubah takdir mereka dan berperan aktif dalam politik dengan cara yang lebih signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam peran perempuan dalam politik tetap menjadi harapan.

Menurut Mona Lena Krook telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab yang dapat memotivasi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Beberapa faktor yang dapat disorot berdasarkan pandangannya adalah:

### **1. Perubahan Politik dan Sosial:**

Perubahan dalam lingkungan politik dan sosial, termasuk perubahan dalam pandangan terhadap peran perempuan dalam politik, dapat menjadi faktor pendorong. Kepemimpinan perempuan yang berhasil dan peningkatan kesadaran akan pentingnya representasi perempuan dalam politik dapat memotivasi perempuan untuk ikut serta.

### **2. Pengalaman Pribadi**

Pengalaman pribadi yang melibatkan ketidaksetaraan gender atau masalah-masalah spesifik yang mempengaruhi perempuan dapat memotivasi mereka untuk terlibat dalam politik untuk mengatasi masalah ini. Adanya dorongan dari pribadi sendiri yang berkeinginan untuk mengubah ataupun memperjuangkan hak-hak dari seorang perempuan. Tidak hanya itu, menjadi caleg juga menjadi sarana bagi perempuan untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

### **3. Tujuan Kebijakan**

Perempuan yang memiliki tujuan politik yang jelas dan tertarik dalam mengatasi isu-isu tertentu dalam masyarakat melalui kebijakan dapat merasa terpanggil untuk mencalonkan diri agar bisa membawa perubahan yang mereka inginkan.

### **4. Persepsi tentang Keterwakilan**

Ketika perempuan merasa bahwa mereka tidak cukup terwakili dalam struktur politik, mereka mungkin merasa dorongan untuk mencalonkan diri agar suara mereka didengar dan perspektif mereka direpresentasikan.

### **5. Faktor Dukungan Keluarga dan Lingkungan:**

Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat menjadi faktor kunci yang memotivasi perempuan untuk mencalonkan diri. Lingkungan yang mendukung dapat memberikan rasa percaya diri dan keyakinan pada kemampuan mereka. Hasil menunjukkan bahwasanya faktor keluarga yaitu banyak dari caleg perempuan yang belum sepenuhnya dapat dari dukungan keluarga, dikarenakan adanya alasan bahwasanya perempuan hanya memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga, perempuan diberikan pilihan antara memilih keluarga atau mengikuti politik. Hal tersebut yang memberikan kebingungan dari sebagian perempuan untuk memilih antara tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga atau pekerjaan politik.

## **D. DAFTAR PUSTAKA**

### **Website**

Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. 2021. "Kota Sungai Penuh dalam Angka 2021".  
Selengkapnya di: [Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh \(bps.go.id\)](https://bps.go.id).

### **Artikel dan Jurnal Ilmiah**

Eusabius Separera Niron, Asterius Bata Seda, 2021. Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* Vol.09, No.2. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Fredik Lambertus Kollo, 2017. Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Krook, Mona Lena, dan Diana Z. O'Brien, 2012. Beyond Supply and Demand: A Review of Research on Gender and Political Recruitment. *Gender & Society* 25, no. 6:

Norris, P & Lovenduski, J, 1995. *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*. London: Cambridge University Press

Vandyk Lumiu, 2015. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Siau Barat Selatan. *Politico Jurnal Ilmu Politik*. Universitas Sam Ratulangi.